

PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Salma Harahap¹, Inkrid Alia², Muhammar Fuadi³, Rodiyah⁴, Rosdanilah⁵,
Siti Masitoh⁶, Ilham Ramadhan Siregar⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

[¹salmaharahap099@gmail.com](mailto:salmaharahap099@gmail.com), [²inkridalia@gmail.com](mailto:inkridalia@gmail.com), [³puadimar@gmail.com](mailto:puadimar@gmail.com),
[⁴rodiah080425@gmail.com](mailto:rodiah080425@gmail.com), [⁵rosdanila6@gmail.com](mailto:rosdanila6@gmail.com),
[⁶sitimasitohlubis65@gmail.com](mailto:sitimasitohlubis65@gmail.com), [⁷ilhamramadan@stain-madina.ac.id](mailto:ilhamramadan@stain-madina.ac.id)

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Mandailing Natal Regency Education Office in improving the quality of education in the region. The primary problem in this study relates to the local government's efforts to manage, foster, and supervise educational units to improve the quality of educational services, which still face various challenges both in terms of resources and regional conditions. The study used a qualitative approach with descriptive methods to obtain a comprehensive picture of the institution's role. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation with parties involved in the provision of education. The data obtained were then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the Mandailing Natal Regency Education Office plays a strategic role as a policy formulator, program implementer, facilitator, and evaluator in efforts to improve the quality of education. Various programs implemented include improving teacher competency through training and workshops, equalizing educational facilities and infrastructure, implementing academic and managerial supervision, and strengthening internal quality assurance systems in schools. Furthermore, the Education Office also builds collaborations with various parties to support the improvement of the quality of educational services. However, the program's implementation still faces several challenges, including budget constraints, uneven distribution of teaching staff, and challenging geographic conditions. Therefore, more comprehensive planning, strengthened coordination between stakeholders, and optimized resource utilization are needed to ensure sustainable improvements in education quality.

Keywords: *Role of the Education Office, Quality of Education, Education Management, Regional Education Policy.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah tersebut. Permasalahan utama dalam penelitian ini berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam mengelola, membina, dan mengawasi satuan pendidikan guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan, yang masih menghadapi berbagai tantangan baik dari aspek sumber daya maupun kondisi wilayah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh

gambaran yang komprehensif mengenai peran lembaga tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal memiliki peran strategis sebagai perumus kebijakan, pelaksana program, fasilitator, sekaligus evaluator dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Berbagai program yang dilaksanakan meliputi peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan workshop, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial, serta penguatan sistem penjaminan mutu internal di sekolah. Selain itu, Dinas Pendidikan juga membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan. Namun demikian, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan anggaran, distribusi tenaga pendidik yang belum merata, serta kondisi geografis wilayah yang cukup menantang. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih komprehensif, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya agar peningkatan mutu pendidikan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran Dinas Pendidikan, Mutu Pendidikan, Manajemen Pendidikan, Kebijakan Pendidikan Daerah.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa. Mutu pendidikan menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan, karena melalui pendidikan yang bermutu akan lahir generasi yang kompeten, berkarakter, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Presiden Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menegaskan bahwa mutu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan besar dalam mengelola pendidikan melalui dinas pendidikan.

Kewenangan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa urusan pendidikan menjadi salah satu

urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (Effendi et al., 2024). Artinya, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program pendidikan di wilayahnya.

Mutu pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan yang bermutu tidak hanya menentukan tingkat kompetensi peserta didik, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan sosial ekonomi suatu daerah. Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kompetensi tenaga pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana, serta efektivitas kebijakan pendidikan yang dijalankan oleh pihak terkait.

Pemerintah daerah, melalui dinas pendidikan, memiliki tanggung jawab strategis dalam merumuskan kebijakan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan guna memastikan tercapainya standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan (Pattipeilohy et al., 2025). Mutu pendidikan sendiri mencakup berbagai aspek, antara lain kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana,

kurikulum, manajemen sekolah, serta hasil belajar peserta didik.

(Vitriya & Tofan, 2025) menyatakan bahwa mutu dalam pendidikan berkaitan dengan upaya memenuhi dan melampaui kebutuhan pelanggan pendidikan melalui perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Dengan demikian, peningkatan mutu pendidikan memerlukan manajemen yang efektif dan kebijakan yang terarah dari lembaga pengelola pendidikan.

Di tingkat daerah, peran Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal menjadi sangat strategis dalam mengimplementasikan kebijakan nasional ke dalam program-program operasional yang sesuai dengan karakteristik daerah. Kabupaten Mandailing Natal sebagai salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara memiliki tantangan tersendiri, seperti kondisi geografis yang luas, persebaran sekolah yang tidak merata, serta keterbatasan fasilitas di beberapa wilayah terpencil.

Kondisi ini menuntut peran aktif Dinas Pendidikan dalam melakukan pembinaan, peningkatan kompetensi guru, pemerataan sarana dan prasarana, serta penguatan supervisi akademik dan manajerial. Penelitian-

penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas peran dinas pendidikan sangat menentukan keberhasilan peningkatan mutu sekolah. (Fatahillah et al., 2023) menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan mutu pendidikan sangat bergantung pada manajemen pendidikan yang profesional, akuntabel, dan partisipatif.

Oleh karena itu, kajian mengenai peran Dinas Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui strategi yang diterapkan, faktor pendukung, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis peran Dinas Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal sebagai bagian dari upaya mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang

mendalam mengenai peran Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui kebijakan, program, serta praktik yang dilaksanakan di lapangan (Ilhami et al., 2024).

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi nyata terkait pelaksanaan pembinaan, supervisi, dan implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu untuk mengkaji secara langsung peran institusi pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Penelitian ini juga dilakukan pada saat kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), sehingga peneliti memiliki kesempatan untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas pembinaan dan supervisi pendidikan yang dilakukan oleh dinas pendidikan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara,

observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan di dinas pendidikan untuk memperoleh informasi mengenai program, strategi, serta tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan mutu pendidikan (Sugiyono, 2022).

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas kerja, program pembinaan, serta proses supervisi pendidikan yang dilakukan oleh dinas pendidikan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa dokumen kebijakan, laporan kegiatan, serta arsip yang berkaitan dengan program peningkatan mutu pendidikan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian (Arianto, 2024). Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan dalam memahami hubungan antar informasi yang diperoleh.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan mutu Pendidikan (Zakariah, Askari & Afriani, 2020).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan **Analisis peran kebijakan**

Peran perumusan kebijakan menunjukkan adanya upaya implementasi desentralisasi pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam konteks ini, dinas pendidikan memiliki kewenangan strategis untuk mengatur dan mengelola pendidikan sesuai karakteristik daerah.

Kebijakan yang disusun sudah mengarah pada pemenuhan standar nasional pendidikan, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek pengukuran kinerja berbasis indikator mutu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan telah menjalankan fungsi *policy formulation* dengan menyusun perencanaan strategis berbasis kebutuhan daerah.

Hal ini sejalan dengan pandangan (Ramdani et al., 2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan peningkatan mutu pendidikan sangat ditentukan oleh efektivitas perencanaan dan kebijakan yang berbasis analisis kebutuhan nyata di lapangan.

Selain itu, pendekatan kebijakan yang mengarah pada peningkatan kompetensi guru dan pemerataan sarana prasarana mencerminkan orientasi pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa mutu pendidikan harus dijaga melalui standar yang terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Secara teoretis, (Ananda & Pohan, 2025) dalam konsep *Total Quality Management in Education* menekankan bahwa kebijakan mutu harus mengarah pada perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Dalam konteks penelitian ini, kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Pendidikan telah menunjukkan orientasi peningkatan mutu, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek

monitoring berbasis indikator kinerja dan pengukuran capaian hasil belajar.

Lebih lanjut, menurut (Kholilul et al., 2026) kebijakan pendidikan daerah akan efektif apabila didukung oleh tiga aspek utama, yaitu: Perencanaan berbasis data, Partisipasi stakeholder pendidikan, dan Evaluasi berbasis kinerja. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek partisipatif sudah mulai diterapkan melalui koordinasi dengan kepala sekolah dan pengawas. Namun, penguatan sistem evaluasi berbasis data masih perlu ditingkatkan agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa peran Dinas Pendidikan sebagai perumus kebijakan telah berjalan secara struktural dan administratif, tetapi masih memerlukan penguatan pada dimensi teknokratis dan evaluatif agar kebijakan yang dihasilkan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Peran sebagai Pelaksana Program

Peran sebagai pelaksana program merupakan fungsi operasional dari kebijakan pendidikan daerah. Dalam perspektif manajemen

pendidikan, fungsi ini berkaitan dengan tahap *actuating* atau pelaksanaan dari perencanaan yang telah disusun (Mulyasa, 2013).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru telah menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan pandangan (Anggraini & Sukartono, 2022) yang menegaskan bahwa mutu pendidikan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, khususnya guru sebagai pelaksana utama proses pembelajaran.

Program pelatihan dan workshop yang dilakukan menunjukkan orientasi pada prinsip *continuous improvement* dalam manajemen mutu pendidikan. Selain itu, pelaksanaan supervisi akademik merupakan bentuk kontrol kualitas dalam proses pembelajaran. Supervisi tidak hanya bertujuan untuk mengawasi, tetapi juga memberikan pembinaan profesional kepada guru. Menurut (Anugerah & Santosa, 2025) supervisi yang efektif harus bersifat konstruktif dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan kualitas pembelajaran secara nyata.

Dari aspek pemerataan sarana prasarana, pelaksanaan program

menunjukkan upaya untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Namun demikian, tantangan geografis di Kabupaten Mandailing Natal menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas distribusi fasilitas pendidikan. Dalam konteks otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan program pendidikan.

Oleh karena itu, efektivitas implementasi program sangat bergantung pada kapasitas manajerial dan pengelolaan anggaran yang profesional.

Secara analitis, pelaksanaan program oleh Dinas Pendidikan telah menunjukkan kesesuaian antara kebijakan dan implementasi. Namun, efektivitas program masih perlu ditingkatkan melalui: Penguatan monitoring berbasis indikator kinerja.

Pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan. Optimalisasi anggaran berbasis prioritas kebutuhan sekolah. Dengan demikian, peran sebagai pelaksana program telah berjalan secara struktural, namun peningkatan kualitas

implementasi menjadi kunci dalam mencapai mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Peran sebagai Fasilitator dan Koordinator

Dalam perspektif manajemen pendidikan, peran fasilitator dan koordinator berkaitan dengan fungsi *organizing* dan *networking* dalam tata kelola pendidikan. (Mutti'ah et al., 2024) menegaskan bahwa efektivitas peningkatan mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga pengelola dalam membangun koordinasi dan kemitraan yang produktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan telah menjalankan fungsi fasilitasi dengan menyediakan dukungan teknis dan administratif kepada sekolah. Hal ini sejalan dengan konsep manajemen mutu pendidikan yang dikemukakan oleh (D. Y. R. Sari et al., 2024) bahwa lembaga pengelola pendidikan harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan sekolah melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Dalam konteks desentralisasi pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki

kewenangan untuk mengoordinasikan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Oleh karena itu, fungsi koordinasi menjadi krusial dalam memastikan kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah. Selain itu, fasilitasi dalam distribusi bantuan dan pendampingan administrasi sekolah mendukung pemenuhan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Tanpa koordinasi dan fasilitasi yang efektif, kebijakan peningkatan mutu berpotensi tidak berjalan optimal. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem koordinasi masih menghadapi kendala, terutama dalam integrasi data pendidikan dan komunikasi lintas sektor. Menurut Taufiq (2022), koordinasi kebijakan pendidikan daerah akan efektif apabila didukung oleh sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan partisipasi aktif seluruh stakeholder.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa peran Dinas Pendidikan sebagai fasilitator dan koordinator telah berjalan secara struktural dan fungsional. Akan tetapi, untuk meningkatkan efektivitasnya,

diperlukan: Penguatan sistem informasi dan basis data pendidikan. Optimalisasi forum komunikasi pendidikan daerah. Pengembangan pola kemitraan yang lebih luas dengan masyarakat dan sektor swasta. Peran fasilitasi dan koordinasi yang efektif akan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dan menjadi fondasi penting dalam peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Peran sebagai Evaluator

Peran sebagai evaluator merupakan fungsi penting dalam siklus manajemen pendidikan, khususnya pada tahap *controlling*. (E. N. Sari, 2026) menyatakan bahwa evaluasi berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks penelitian ini, Dinas Pendidikan telah menjalankan fungsi pengawasan melalui *monitoring* dan supervisi. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme kontrol terhadap mutu proses dan hasil pendidikan. Secara teoretis, evaluasi pendidikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus bersifat reflektif dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) sebagaimana

dikemukakan oleh (Konstantin et al., 2025).

Evaluasi yang dilakukan melalui supervisi akademik sejalan dengan upaya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang tersebut menegaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan nasional.

Selain itu, dalam kerangka otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar, termasuk pendidikan. Oleh karena itu, fungsi evaluator menjadi aspek strategis dalam memastikan efektivitas kebijakan daerah.

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan masih dominan pada aspek administratif, seperti kelengkapan dokumen dan laporan. Menurut (Fitri et al., 2025) evaluasi kebijakan pendidikan daerah akan efektif apabila berbasis pada indikator kinerja yang terukur dan

analisis data yang komprehensif. Evaluasi yang hanya berfokus pada prosedur tanpa analisis dampak tidak akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu.

Secara analitis, peran evaluator yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan telah memenuhi fungsi formal pengawasan. Akan tetapi, untuk meningkatkan efektivitasnya diperlukan Penguatan sistem evaluasi berbasis data dan capaian hasil belajar. Integrasi sistem informasi manajemen pendidikan daerah. Peningkatan kapasitas pengawas dalam melakukan evaluasi berbasis kinerja. Dengan demikian, peran sebagai evaluator tidak hanya memastikan kepatuhan administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Peran Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Kompetensi Guru

Salah satu faktor utama yang menentukan mutu pendidikan adalah kualitas tenaga pendidik. Guru memiliki peran penting sebagai pelaksana utama proses pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru menjadi salah satu fokus utama yang

dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa Dinas Pendidikan secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi guru, seperti pelatihan, workshop, seminar pendidikan, serta bimbingan teknis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.

Program pelatihan yang dilakukan oleh dinas pendidikan tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan mengajar, tetapi juga pada penguasaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Hal ini menjadi penting mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut guru untuk mampu memanfaatkan berbagai media pembelajaran digital dalam kegiatan belajar mengajar.

Selain itu, melalui kegiatan pelatihan dan workshop tersebut, guru juga diberikan kesempatan untuk saling berbagi pengalaman serta mendiskusikan berbagai

permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan guru, tetapi juga mendorong terciptanya komunitas belajar di kalangan tenaga pendidik. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu pelaksanaan pelatihan serta jumlah peserta yang belum dapat mencakup seluruh guru secara merata. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih terstruktur agar kegiatan peningkatan kompetensi guru dapat menjangkau seluruh tenaga pendidik di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Pemerataan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Selain peningkatan kualitas tenaga pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi faktor penting dalam mendukung mutu pendidikan. Sarana dan prasarana yang memadai akan membantu terciptanya proses pembelajaran yang lebih efektif dan kondusif.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal telah berupaya untuk

meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di berbagai sekolah. Upaya tersebut dilakukan melalui pengadaan fasilitas pembelajaran, perbaikan gedung sekolah, penyediaan laboratorium, serta pengadaan perangkat teknologi pendidikan. Penyediaan sarana dan prasarana ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung aktivitas pembelajaran siswa. Sekolah yang memiliki fasilitas yang memadai akan lebih mudah dalam melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan, baik kegiatan akademik maupun kegiatan ekstrakurikuler.

Namun demikian, kondisi geografis Kabupaten Mandailing Natal yang cukup luas dan terdiri dari berbagai wilayah terpencil menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan fasilitas pendidikan. Beberapa sekolah yang berada di daerah terpencil masih mengalami keterbatasan sarana dan prasarana dibandingkan dengan sekolah yang berada di wilayah perkotaan.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih strategis dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan untuk memastikan bahwa seluruh sekolah memperoleh akses

fasilitas pendidikan yang memadai secara merata.

Penguatan Sistem Pengawasan dan Supervisi Pendidikan

Supervisi pendidikan merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan melalui pengawas sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan supervisi yang dilakukan oleh dinas pendidikan meliputi supervisi akademik dan supervisi manajerial. Supervisi akademik bertujuan untuk memantau dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas. Sementara itu, supervisi manajerial bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah.

Melalui kegiatan supervisi tersebut, pengawas sekolah dapat memberikan masukan, saran, serta rekomendasi kepada guru dan kepala sekolah terkait berbagai aspek yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Dengan demikian, supervisi tidak hanya

berfungsi sebagai kegiatan pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan profesional bagi tenaga pendidik.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan supervisi masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah pengawas sekolah serta luasnya wilayah kerja yang harus diawasi. Kondisi ini menyebabkan frekuensi supervisi yang dilakukan belum dapat menjangkau seluruh sekolah secara optimal.

Kolaborasi antara Dinas Pendidikan, Sekolah, dan Masyarakat

Keberhasilan peningkatan mutu pendidikan tidak hanya bergantung pada peran pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, kerja sama antara dinas pendidikan, pihak sekolah, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal telah berupaya membangun kerja sama dengan berbagai pihak, seperti komite

sekolah, organisasi masyarakat, serta lembaga pendidikan lainnya. Kerja sama ini dilakukan dalam bentuk dukungan terhadap kegiatan pendidikan, penyediaan fasilitas belajar, serta partisipasi dalam berbagai program pengembangan sekolah.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan, terutama dalam memberikan dukungan moral dan motivasi kepada peserta didik. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sekolah juga dapat membantu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan.

Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat, diharapkan upaya peningkatan mutu pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal melalui empat fungsi utama, yaitu sebagai

perumus kebijakan, pelaksana program, fasilitator dan koordinator, serta evaluator.

Sebagai perumus kebijakan, Dinas Pendidikan telah menyusun perencanaan dan kebijakan yang mengarah pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan serta kebutuhan daerah. Sebagai pelaksana program, berbagai upaya dilakukan melalui peningkatan kompetensi guru, supervisi akademik, dan pemerataan sarana prasarana. Dalam peran fasilitator dan koordinator, Dinas Pendidikan membangun kerja sama dan memberikan dukungan teknis kepada sekolah untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif. Sementara itu, sebagai evaluator, Dinas Pendidikan menjalankan fungsi monitoring dan pengawasan guna menjaga mutu layanan pendidikan.

Meskipun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan anggaran, distribusi tenaga pendidik yang belum merata, serta tantangan geografis wilayah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan berbasis data, optimalisasi koordinasi antar pemangku kepentingan, serta

pengembangan sistem evaluasi berbasis kinerja agar peningkatan mutu pendidikan dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, F., & Pohan, S. (2025). Konsep Manajemen Pendidikan Karakter Dalam Membentuk Sikap Religius Murid di Tadika Suria Edukids Center. *Tarlim : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(1), 149–159. <https://doi.org/10.32528/tarlim.v8i1.2974>
- Anggraini, S., & Sukartono, S. (2022). Upaya Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 5287–5294. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.3071>
- Anugerah, J. F., & Santosa, E. B. (2025). Supervisi Akademik dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Pendidikan Vokasi: Studi Kualitatif di SMK Negeri. *Indonesian Journal Of Learning and Instructional Innovation*, 3(1), 3025–8316. <https://journal.uns.ac.id/ijolii>
- Arianto, B. (2024). *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif*. <https://doi.org/10.70310/q81zdh33>
- Effendi, M., Warsah, I., & Bahri, S. (2024). Implementasi Manajemen Pendidikan Karakter Berbasis Adab di Sekolah Dasar Islam Terpadu. *Dirasah : Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 513–523. <https://doi.org/10.58401/dirasah.v7i2.1332>
- Fatahillah, S. M., Makruf, I., & Rusdiyanto, M. (2023). Model Analisis SWOT Manajemen Pendidikan Islam , Adaptasi. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 12(4), 833–848. <https://mail.jurnaldidaktika.org/contents/article/view/316%0Ahttps://mail.jurnaldidaktika.org/contents/article/download/316/217>
- Fitri, E., Pohan, M. M., & Nurzen, M. (2025). THE ROLE OF SCHOOL SUPERVISORS IN CONTROLLING TEACHER QUALITY. *Pionir: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 1–17.
- Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Penerapan Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), 462–469.
- Kholilul, Natasya, Ningrum, S., Syifa, K. N., Fitria, Y. N., Amelia, A., & Fahlepy, B. R. (2026). Analisis Implementasi Fungsi Pengorganisasian dalam Manajemen Talenta Perusahaan Startup Teknologi di Jakarta pada Era Transformasi Digital. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis*, 5(1), 586–594.
- Konstantin, L., Naen, R., & Pananrangi, A. R. (2025). Mekanisme dan Tata Cara Pengawasan dan Quality Control Aparatur Sipil Negara Pada Inspektorat Daerah Kota Makassar. *Paradigma Journal of Administration*, 3(1), 57–61. <https://doi.org/10.35965/pja.v3i1.6029>
- Mutti'ah, K., Khasanah, R. N., & Subandi. (2024). Meningkatkan Proses Pembelajaran. *Jurnal Media Akademik*, 2(6), 1–12.
- Pattipeilohy, P., Cindy, A. H., & Pattiasina, J. (2025). MENENUN BUDAYA MUTU MELALUI

- LITERASI DIGITAL : INOVASI MANAJEMEN STRATEGIS DALAM DUNIA PENDIDIKAN. *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*, 14(3), 312–321.
- Ramdani, U. P., Islam, M. P., & Islam, M. P. (2024). Gerakan Manajemen Literasi dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa Sebagai Transfigurasi Perpustakaan di MAS YPK Cijulang. *JSTAF*, 03(2), 304–321.
- Sari, D. Y. R., Abdullah, G., & Ginting, R. B. (2024). Implementasi Supervisi Akademik Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Di Sekolah*, 5(2), 794–804.
<https://doi.org/10.51874/jjips.v5i2.270>
- Sari, E. N. (2026). *Effectiveness Of Internal Control Systems And Good University Governance On Fraud Prevention With Organizational Commitment*. 13(1), 348–362.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); Empat). ALFABETA.
- Vitriya, R., & Tofan, A. (2025). *The Role Of Financial Management In The Sustainability Of Micro , Small , And Medium Enterprises (MSMES) In East Java Peran Manajemen Keuangan Dalam Keberlanjutan Usaha Mikro , Kecil , Dan*. 6(4), 5097–5100.
- Zakariah, Askari & Afriani, V. & Z. (2020). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R and D)*.